2019

Laporan
Tahunan

www.pn-samarinda.go.id
Jl.M.yamin No.1, Samarinda
pn.samarinda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, termasuk dalam penyusunan Laporan Tahunan 2019.

Terselesaikannya Laporan Tahunan ini tidak terlepas dari kerja sama semua bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan. Laporan Tahunan ini mengandung maksud sebagai tolak ukur sejauh mana tugas - tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Tahunan 2019 ini merupakan Laporan Tahunan ke lima dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A Tahun 2015-2019 , yang melaporkan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik di bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan telah tersusunnya Laporan Tahunan ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian , semoga Allah SWT merahmati kita semua.

20 Januari 2020

Ketua

HONGKUN OTOH, S.H.M.H

NIP19670706 1992 12 1001

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Kebijakan Umum Peradilan	1
	B. Visi dan Misi	2
	C. Rencana Strategis	4
BAB II	**A. Keadaan Perkara**	
	1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama	
	2. Keadaan Perkara di Tingkat Banding	
	3. Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi	
	4. Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan kembali3. Inovasi Pelayanan Publik	
	B. Penyelesaian Perkara	
	1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	
	2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	
	3. Jumlah Perkara yang tidak megajukan upaya hokum Banding,Kasasi,PK	
	4. Jumlah Perkara berhasil di mediasi	
	5. Jumlah perkara anak yang berhasil melaui diversi	
	C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	
	1. Posbakum	
	2. Sidang Keliling Pelayanan Terpadu	57
	3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara	57
BAB III	**SUMBER DAYA MANUSIA**	58
	1. Rekrutmen	63
	2. Mutasi	63
	3. Promosi	63
	4. Diklat	64
	5. Pensiun	64
	6. Pengisian Jabatan	65
	B. Penyelesaian Perkara	65
	1. Jumlah sisa Perkara yang diputus	73
	2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	73
	3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK)	73
	4.Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi	73
	5.Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui di Mediasi	74
BAB IV .	**Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi**	
	A. Pengelolaan Keuangan	77
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	77
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	77
	- Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Umum	77

- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum 77
BAB. V. Peningkatan Pelayanan Publik 77
1. Akreditas Penjaminan Mutu 77
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 80

3. Inovasi Pelayanan Publik

BAB IV PENGAWASAN 97
A. Internal 97
B.Evaluasi 100

BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN 103

- KEADAAN PERKARA PN SAMARINDA 103
- REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata , HI, Tipikor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi ***"Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"***– Sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print (Cetak Biru)* Mahkamah Agung RI 2010 – 2035, Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print (Cetak Biru)* Mahkamah Agung, yaitu:

1. Kepemimpinan dan managemen pengadilan;
2. Kebijakan peradilan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran;
4. Penyelenggaraan persidangan;
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan;
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Urusan Perencaan, IT dan Pelaporan, Urusan Umum dan Keuangan dan Urusan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana beserta seluruh staff.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian-bagian dari Aparatur Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang ada

di Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA telah bekerja dengan ***"sungguh"*** dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi visi Badan Peradilan yaitu **"Terwujudnya Pengadilan Negeri, HI,TipikorSamarinda Kelas IA Yang Agung"** bisa tercapai, serta sesuai pula dengan kebijakan umum pemerintahan yaitu membangun Bangsa dan Negara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang harus dilaksanakan Organisasi Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA memiliki visi dan misi dengan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA yaitu

" TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA YANG AGUNG "

Misi Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilandi Pengadilan Negeri SamarindaKelas IA
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA.

❖ KEBIJAKAN MUTU

Dalam menjalankan misi tersebut, Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda menetapkan kebijakan mutu sebagai berikut :

" MEMBERI KUALITAS PELAYANAN PERADILAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI / HI/ TIPIKOR SAMARINDA "

❖ BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA yang mengadopsi dari Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan Peradilan , sehingga menetapkan budaya kerja :

- Sederhana
- Murah
- Akuntabel
- Resfonsif
- Transparan
- Cermat
- Objektif
- Unggul
- Ramah
- Terbuka

❖ **MOTTO**

Budaya kerja Pengadilan Negeri ,HI. Tipikor Samarinda Kelas IA mengusung motto :

"SMILE"

SANTUN, MELAYANI, INOVATIF, LUGAS, ENERGIK.

5 R

Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin

❖ **3S**

SENYUM, SAPA, SALAM

❖ **Yel – Yel**

MAHKAMAH AGUNG - MAJU

DIRJEND BADILUM - SUKSES

PT, KALTIM - BERMUTU

PN.SAMARINDA - JAYA, JAYA, JAYA

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah lima tahun Sedangkan Program Jangka Panjang dua puluh lima tahun disebut dengan Blueprint (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek satu tahun disebut dengan Rencana Kerja Tahunan.

Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka Menengah.Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu pada pengertian Rencana Kerja Tahunan.

Ditetapkannya program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek tersebut adalah merupakan pentahapan kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab tentang Visi dan Misi tersebut di atas.

Sejak awal tahun 2012, untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA telah merumuskan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) – sebagai Program Jangka Menengah lima tahunan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel..
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya kwalitas pengawasan.

BAB II
KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA terdiri dari Perkara Perdata, Perkara Pidana, HI dan Tipikor. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun Keadaan perkara perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dapat dilihat pada:

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

KEADAAN PERKARA PIDANA

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018 belum putus	Sisa Tahun 2018 putus belum minutasi	Masuk Tahun 2019	Beban Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Minutasi Tahun 2019	Sisa Perkara Putus Belum Minutasi Tahun	Sisa Perkara Belum Putus Tahun 2019
1.	Pidana Biasa	139	18	1215	-	1132	1000	114	281
2.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pidana Cepat	-	-	216	-	216	216	-	-
4.	Pidana Lalu Lintas	-	-	21370	-	21370	21370	-	-
5.	Pidana Anak	7	1	47	-	47	47	5	-
6.	Pidana Pra Peradilan	-	-	6	-	5	4	1	1
7.	Pidana Tipikor	-	4	34	-	26	8	8	8
	Jumlah	146	23	22888	-	22796	22645	128	290

KEADAAN PERKARA PERDATA									
No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018 belum putus	Sisa Tahun 2018 putus belum minutasi	Masuk Tahun 2019	Beban Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Minutasi Tahun 2019	Sisa Perkara Putus Belum Minutasi Tahun 2019	Sisa Perkara Belum Putus Tahun 2019
1.	Perdata Gugatan	87	98	192	-	186	75	111	93
2.	Perdata Permohonan	46	46	570	-	575	575	-	41
3.	Perdata Gugatan Sederhana	1	-	13	-	13	9	4	1
4.	Gugatan PHI	33	43	104	-	97	54	54	40
Jumlah		167	187	779	-	871	613	169	175

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

KEADAAN PERKARA PIDANA						
No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Banding	Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2019	Beban Upaya Hukum Banding Tahun 2019	Putus Upaya Hukum Banding Tahun 2019	Sisa Upaya Hukum Banding Tahun 2019
1.	Pidana Biasa	-	59	-	52	7
2.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
4.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-
5.	Pidana Tipikor	5	28	-	25	3
Jumlah		5	87	-	77	10

KEADAAN PERKARA PERDATA						
No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Banding	Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2019	Beban Upaya Hukum Banding Tahun 2019	Putus Upaya Hukum Banding Tahun 2019	Sisa Upaya Hukum Banding Tahun 2019
1.	Gugatan Perdata	-	37	-	-	-
2.	Gugatan PHI	-	-	-	-	-
Jumlah		-	37	-	-	-

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

KEADAAN PERKARA PIDANA						
No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Kasasi	Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019	Beban Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019	Putus Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019	Sisa Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019
1.	Pidana Biasa	-	26	-	5	21
2.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3.	Pidana Tipikor	-	28	-	25	3
	Jumlah	-	54	-	30	24

KEADAAN PERKARA PERDATA						
No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum Kasasi	Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019	Beban Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019	Putus Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019	Sisa Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019
1.	Gugatan Perdata	-	39	-	-	-
2.	Permohonan	-	-	-	-	-
3.	Gugatan PHI	35	34	-	28	34
	Jumlah	35	73	-	28	34

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

KEADAAN PERKARA PIDANA						
No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum PK	Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2019	Beban Upaya Hukum PK Tahun 2019	Putus Upaya Hukum PK Tahun 2019	Sisa Upaya Hukum PKTahun 2019
1.	Pidana Biasa	-	3	-	1	2
2.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3.	Pidana Tipikor	-	2	-	1	1
	Jumlah	-	5	-	2	3

KEADAAN PERKARA PERDATA						
No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya belum putus Upaya Hukum PK	Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2019	Beban Upaya Hukum PK Tahun 2019	Putus Upaya Hukum PK Tahun 2019	Sisa Upaya Hukum PKTahun 2019
1.	Gugatan Perdata	-	8	-	-	8
2.	Gugatan PHI	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	8	-	-	8

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

NO.	SATKER	PERKARA								JML HAKIM	KET
		PIDANA BIASA				PERKARA CEPAT/RINGAN					
		Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa	Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadilan Negeri ,HI,Tipikor Samarinda Kelas IA	2.557	1.215	1.132	2.640	-	216	216	-	17	

NO.	SATKER	PERKARA								JML HAKIM	KET
		PERKARA LALU LINTAS				PERKARA TIPIKOR					
		Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa	Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadilan Negeri ,HI,Tipikor Samarinda Kelas IA	-	19.345	19.345	-	243	35	49	229	17	

NO.	SATKER	PERKARA PERDATA								JML HAKIM	KET
		GUGATAN				PERMOHONAN					
		Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa	Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadilan Negeri ,HI,Tipikor Samarinda Kelas IA	1.112	192	187	1122	412	570	576	405	17	

NO.	SATKER	PERKARA								JML HAKIM	KET
		HUBUNGAN INDUSTRIAL				PERKARA GUGATAN SEDERHANA					
		Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa	Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadilan Negeri ,HI,Tipikor Samarinda Kelas IA	461	95	86	465	20	12	14	18	17	

NO.	SATKER	PERKARA								JML HAKIM	KET
		PERKARA ANAK				PRAPERADILAN					
		Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa	Sisa Tahun Lalu 2018	Masuk 2019	Putus	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadilan Negeri ,HI,Tipikor Samarinda Kelas IA				27				7	17	

REKAPITULASI PERINCIAN BULAN PERKARA PUTUS TAHUN 2019

NO.	BULAN	PERKARA								JUMLAH HAKIM
		PIDANA BIASA				PIDANA CEPAT				
		SISA BLN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA BLN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Januari	139	120	110	149	-	-	-	-	-
2.	Februari	149	90	73	166	-	-	-	-	-
3.	Maret	166	91	76	181	-	-	-	-	-
4.	April	181	95	94	182	-	3	3	-	17
5.	Mei	182	120	65	237	--	6	6	-	17
6.	Juni	237	90	80	247	-	-	-	-	-
7.	Juli	247	135	98	284	-	72	72	-	17
8.	Agustus	284	106	114	276	-	57	57	-	17
9.	September	276	64	86	254	-	18	18	-	17
10.	Oktober	254	114	163	205	-	-	-	-	-
11.	November	205	144	112	237	-	57	57	-	17
12.	Desember	237	46	61	222	-	3	3	-	17
	JUMLAH	2.557	1.215	1.132	2.640	-	216	216	-	17

NO.	BULAN	PERKARA								JUMLAH HAKIM
		PIDANA LALU LINTAS				TIPIKOR				
		SISA BLN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA BLN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Januari	-	225	225	-	30	6	2	34	17
2.	Februari	-	1900	1900	-	34	1	2	33	17
3.	Maret	-	1750	1750	-	33	2	14	21	17
4.	April	-	620	620	-	21	1	6	16	17
5.	Mei	--	1750	1750	--	16	4	4	16	17
6.	Juni	-	400	400	-	16	5	4	17	17
7.	Juli	-	1300	1300	-	17	-	5	12	17
8.	Agustus	-	2550	2550	-	12	3	3	12	17
9.	September	-	1550	1550	-	12	8	1	19	17
10.	Oktober	-	2800	2800	-	19	1	2	18	17
11.	November	-	2700	2700	-	18	1	4	15	17
12.	Desember	-	1800	1800	-	15	3	2	16	17
	JUMLAH	-	19.345	19.345	-	243	35	49	229	17

NO.	BULAN	PERKARA										JUMLAH HAKIM
		PERDATA GUGATAN					PERMOHONAN					
		SISA BLN LALU	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	SISA BLN LALU	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Januari	87	12	16	-	83	46	63	71	-	38	17
2.	Februari	83	24	14	-	93	38	45	50	-	33	17
3.	Maret	93	19	9	-	103	33	51	61	-	23	17
4.	April	103	16	19	-	100	24	39	33	-	30	17
5.	Mei	100	9	14	--	95	30	44	42	-	32	17
6.	Juni	95	17	8	-	104	32	30	32	-	30	17
7.	Juli	104	14	26	-	92	30	46	51	-	25	17
8.	Agustus	92	12	11	-	93	25	57	40	-	42	17
9.	September	93	22	23	-	92	42	49	58	-	33	17
10.	Oktober	92	16	24	-	84	33	51	41	-	43	17
11.	November	84	22	15	-	91	43	56	63	-	36	17
12.	Desember	91	9	8	-	92	36	39	34	-	41	17
	JUMLAH	1.112	192	187	-	1.122	412	570	576	-	405	17

NO.	BULAN	PERKARA					PERKARA					JUMLAH HAKIM
		HUBUNGAN INDUSTRIAL (HI)					PERDATA GUGATAN SEDERHANA					
		SISA BLN LALU	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	SISA BLN LALU	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	
1.	2	3	4	5	6	7	-	-	-	-	-	21
1.	Januari	33	6	6	-	33	1	2	1	-	2	17
2.	Februari	33	17	6	-	44	2	2	2	-	2	17
3.	Maret	44	14	8	3	47	2	1	1	-	3	17
4.	April	47	9	8	-	48	3	-	1	-	2	17
5.	Mei	48	5	7	-	46	2	1	2	-	1	17
6.	Juni	46	4	5	--	45	1	1	1	-	1	17
7.	Juli	45	6	6	-	45	1	3	-	-	4	17
8.	Agustus	45	5	9	-	42	4	1	4	-	1	17
9.	September	42	9	7	-	44	1	-	-	-	1	17
10.	Oktober	44	10	20	-	34	1	-	1	-	-	17
11.	November	34	10	4	3	37	-	1	-	-	1	17
12.	Desember	37	9	6	-	2	2	-	1	-	1	17
	JUMLAH	461	95	86	3	465	20	12	14	-	18	17

PERINCIAN PERKARA PERDATA

Perkara AnakdanPerkara Praperadilan yang masuk dan diproses menurut Bulan adalah:

NO.	BULAN	PERKARA ANAK					PERKARA PRAPERADILAN					JUMLAH HAKIM
		SISA	MASUK	PUTUS	DIVERSI	SISA	SISA	MASUK	PUTUS	DIVERSI	SISA	
1.	Januari	7	11	7	-	11	-	-	-	-	-	17
2.	Februari	11	4	14	-	1	-	-	-	-	-	17
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
4.	April	2	7	3	-	2	1	1	1	-	1	17
5.	Mei	4	5	3	1	5	1	-	1	-	-	17
6.	Juni	5	1	4	--	2	-	2	2	-	-	17
7.	Juli	2	3	4	-	1	2	-	-	-	2	17
8.	Agustus	1	4	2	-	-	-	2	1	-	1	17
9.	September	3	5	6	-	2	1	-	-	-	1	17
10.	Oktober	2	2	3	-	1	1	-	1	-	-	17
11.	November	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1	17
12.	Desember	2	-	2	-	-	1	1	1	-	1	17
JUMLAH		40	43	48	1	27	7	7	7	-	7	17

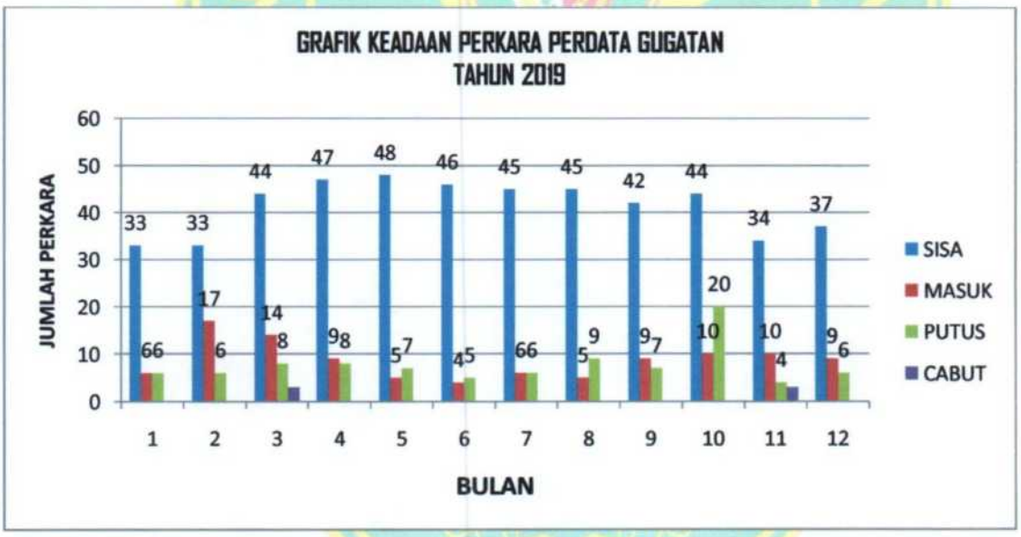

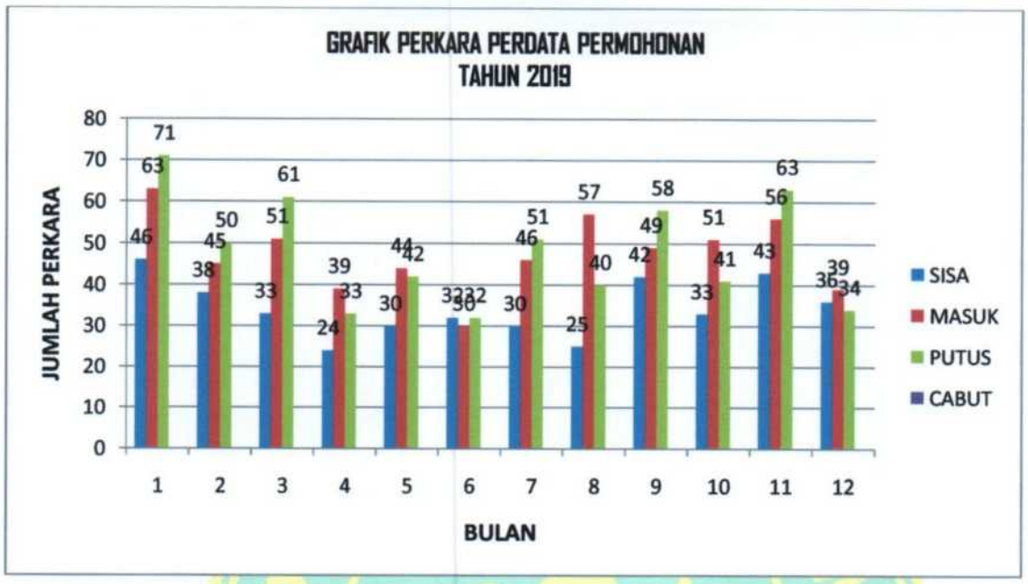
GRAFIK PERKARA PERDATA PERMOHONAN
TAHUN 2019
JUMLAH PERKARA
BULAN
SISA
MASUK
PUTUS
CABUT

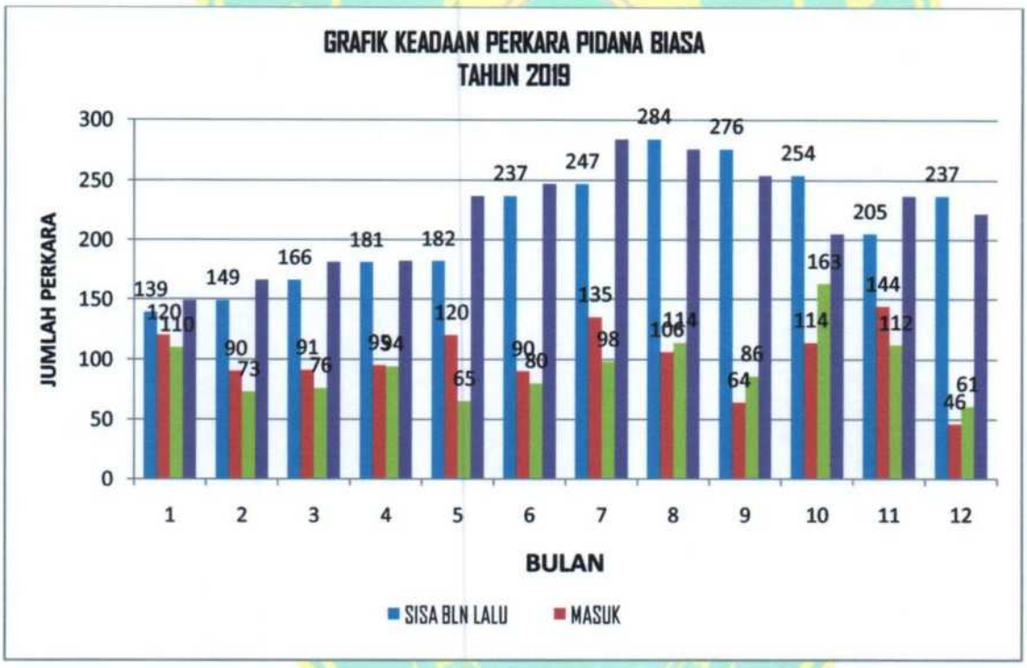
GRAFIK KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA
TAHUN 2019
JUMLAH PERKARA
BULAN
SISA BLN LALU
MASUK

GRAFIK KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN
TAHUN 2019
JUMLAH PERKARA
BULAN
SISA BLN LALU
MASUK
PUTUS
SISA

GRAFIK KEADAAN PERKARA PIDANA SINGKAT
TAHUN 2019
JUMLAH PERKARA
BULAN
SISA
MASUK
PUTUS

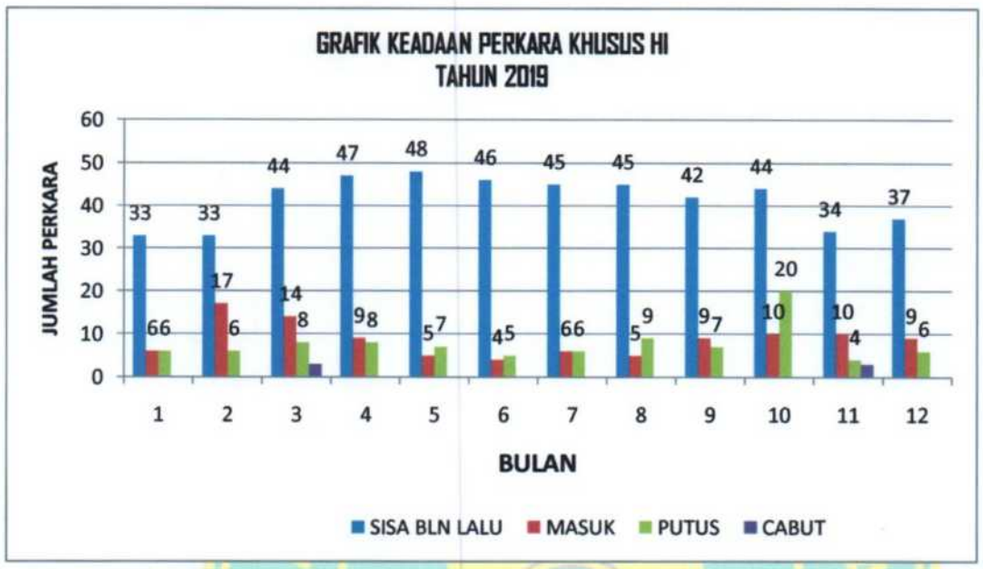
GRAFIK KEADAAN PERKARA KHUSUS HI
TAHUN 2019
JUMLAH PERKARA
BULAN
SISA BLN LALU
MASUK
PUTUS
CABUT

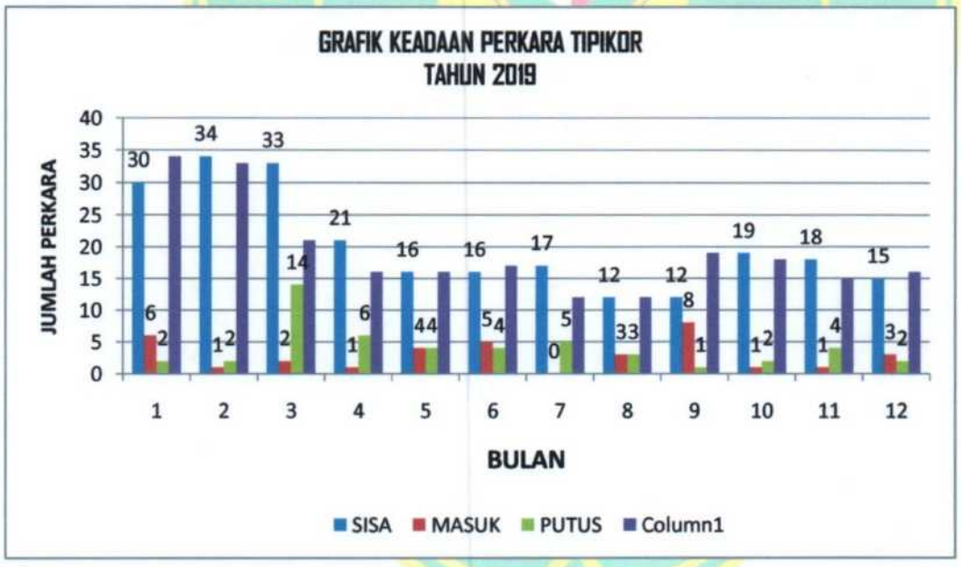
GRAFIK KEADAAN PERKARA TIPIKOR
TAHUN 2019
JUMLAH PERKARA
BULAN
SISA
MASUK
PUTUS
Column1

Untuk data perkara Pidana Pelanggaran lalu Lintas yang kami terima dan proses pada Tahun 2019adalah :

NO.	BULAN	MASUK BULAN INI	PUTUS BULAN INI
1.	JANUARI	225	225
2.	FEBRUARI	1900	1900
3.	MARET	1750	1750
4.	APRIL	620	620
5.	MEI	1750	1750
6.	JUNI	400	400
7.	JULI	1300	1300
8.	AGUSTUS	2550	2550
9.	SEPTEMBER	1550	1550
10.	OKTOBER	2800	2800
11.	NOVEMBER	2700	2700
12.	DESEMBER	1800	1800
JUMLAH KESELURUHAN PERKARA TILANG			**19.345**
JUMLAH KESELURUHAN DENDA (Rp.)			

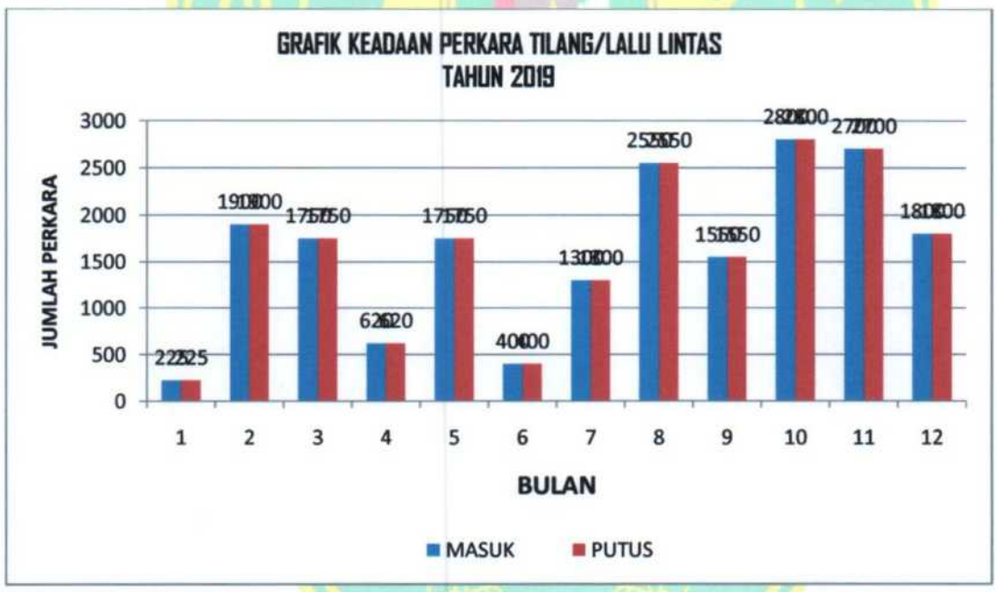

Keadaan Perkara secara keseluruhan yang diterima dan diproses selama tahun 2019 adalah :

NO.	PERKARA	JML MASUK + SISA TAHUN LALU	PERKARA PUTUS
1.	PIDANA BIASA	3.772	1.132
2.	PIDANA LALU LINTAS	19.345	19.345
3.	RINGAN/CEPAT/SINGKAT	216	216
4.	PERDATA GUGATAN	1.309	187
5.	PERDATA PERMOHONAN	981	576
6.	PERDATA GUGATAN PHI	556	86
7.	PIDANA KORUPSI	278	49
8.	PERKARA ANAK	83	48
9.	PRAPERADILAN	14	7
10	GUGATAN SEDERHANA	32	14
JUMLAH		26586	21660

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pidana Umum	1.132
2.	Pidana Khusus Tipikor	49
3.	Perdata Gugatan	187
4.	Perdata khusus HI	86
5.	Permohonan	576
6	Perkara Anak	48
7	Praperadilan	7
8	Gugatan sederhana	14

3. Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding ,Kasasi dan PK

No.	Uraian	Banding	Kasasi	PK	Jumlah
1.	Pidana Umum Biasa	6	4	1	11
2.	Pidana Khusus Tipikor	17	17	2	36
4.	Perdata Khusus HI	-	27	-	27

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

No.	Uraian	Jumlah
1.	Perdata Gugatan : *Berhasil dengan akta perdamaian *Berhasil dengan pencabutan *Tidak dapat dilaksanakan *Tidak berhasil	Perkara nihil
2.	Perdata khusus HI	nihil
3.	Permohonan	nihil

5. Jumlah Perkara Anak melalui Diversi

NO	URAIAN	JUMLAH PERKARA	KET
1.	Perkara Pidana Anak	- Perkara	
2.	Perkara Pidana Anak	- Perkara	

6. Keadaan Perkara melalui e-Court

Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court Tahun 2019

No.	Nama Satker	Diterima	Jumlah Perkara Secara Elektronik				
			Diputus				Sisa/Masih Dalam Proses
			Dicabut	Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1	PN.Samarinda Kelas 1A	30	-	5	-	5	25

7. KEADAAN KEUANGAN PERKARA :

1. Perkara Perdata

No.	Uraian		Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Keuangan	Januari	1.277.789.395	69.662.500	64.523.000	1.282.928.895	
2	Perkara Perdata	Pebruari	1.282.928.895	107.582.500	54.756.500	1.335.511.395	
3		Maret	1.335.754.895	91.756.500	63.991.500	1.363.519.895	
4		April	1.363.519.895	94.663.00	65.276.500	1.392.906.395	
5		Mei	1.392.906.395	90.465.000	86.221.000	1.397.150.395	
6		Juni	1.397.150.395	69.194.000	32.458.500	1.433.887.895	
7		Juli	1.433.887.895	106.025.000	62.257.500.000	1.477.654.895	
8		Agustus	1.477.654.895	90.895.000	122.730500	1.445.819.395	
9		September	1.445.819.395	120.278.000	94.865.500	1.471.230.895	
10		Oktober	1.471.230.895	131.963.000	95.285.600	1.508.147.295	
11		Nopember	1.508.147.295	114.206.000	120.221.500	1.502.131.795	
12		Desember	1.502.131.795	50.953.000	72.026.500	1.481.078.295	
	Jumlah		16.888.922.040	1.137.643.500	934.613.100	17.091.952.440	

2. Perkara Eksekusi

No.	Uraian	Bulan	Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Keuangan	Jan	453.135.000	15.649.494.000	25.124.000	16.077.505.000	
2	Perkara	Peb	16.077.506.000	12.206.000	15.647.671.000	442.040.000	
3	Eksekusi	Mrt	442.040.000	514.268.000	522.821.000	433.821.000	
4		April	433.821.000	5.272.000	5.844.000	433.249.000	
5		Mei	433.249.000	500.000	1.488.000	432.261.000	
6		Juni	432.261.000	-	174.000	432.087.000	
7		Juli	432.087.000	23.268.000	70.000	455.285.000	
8		Agus	455.285.000	6.982.000	5.109.000	457.158.000	
9		Sept	457.158.000	10.086.000	18.247.000	448.997.000	
10		Okt	448.997.000	8.162.000	17.774.000	439.285.000	
11		Nop	439.385.000	12.635,000	8.152.500	443.567.500	
12		Des	443.567.500	15.000	7.841.000	435.741.500	
	Jumlah		20.948.491.500	16.242.888.000	16.260.315.500	20.931.064.000	

3. Perkara Konsinyasi

No.	Uraian	Bulan	Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Keuangan	Jan	10.953.580.299	198.799.668	2.067.102.925	9.085.277.042	
2	Perkara	Peb	9.085.277.042	3.561.758.955	2.458.007.141	10.189.028.856	
3	Konsinyasi	Mrt	10.189.028.856	1.149.976.067	1.488.732.292	9.850.272.631	
4		April	9.850.272.631	23.865.000	448.748.932	9.425.388.699	
5		Mei	9.425.388.699	7.955.000	829.585.657	8.603.758.042	
6		Juni	8.603.758.042	-	3.756.000	8.600.002.042	
7		Juli	8.600.002.042	1.159.598.044	1.542.000	9.758.058.086	
8		Agust	9.758.058.086	1.685.089.817	527.446.423.000	10.915.701.480	
9		Sept	10.915.701.480	-	584.801.161.000	10.330.900.319	
10		Okt	10.330.900.319	-	34.856.724	10.296.043.595	
11		Nop	10.296.043.595	-	-	10.296.043.595	
12		Des	10.296.043.595	-	-	10.296.043.595	
	Jumlah		118.304.054.686	7.787.042.551	8.444.579.255	116.338.486.908	

1. Perkara Keuangan PHI

No.	Uraian	Bulan	Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Keuangan	Jan	115.724.000	12.408.000	19.203.000	108.929.000	
2	Perkara	Peb	108.929.000	24.412.000	4.649.000	128.692.000	
3	PHI	Mrt	128.929.000	22.918.000	10.164.000	141.446.000	
4		April	141.446.000	2.885.000	12.194.000	132.137.000	
5		Mei	132.137.000	4.656.000	13.178.000	123.615.000	
6		Juni	123.615.000	5.152.000	3.551.000	124.576.000	
7		Juli	124.576.000	6.906.000	19.571.000	111.911.000	
8		Agus	111.911.000	3.670.000	4.919.000	110.662.000	
9		Sept	110.662.000	7.944.000	10.885.000	107.721.000	
10		Okt	107.721.000	19.547.000	22.329.000	104.939.000	
11		Nop	104.939.000	9.983.000	12.186.000	102.736.000	
12		Des	102.736.000	12.253.000	12.110.000	102.879.000	
	Jumlah		1.413.088.000	132.734.000	145.579.000	1.400.243.000	

2. Perkara Keuangan Eksekusi PHI

No.	Uraian	Bulan	Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Keuangan	Jan	9.743.000	114.000	114.000	9.743.000	
2	Perkara	Peb	9.743.000	-	-	9.743.000	
3	Eksekusi PHI	Mrt	9.743.000	1.500.000	-	11.243.000	
4		April	11.243.000	-	6.000	11.237.000	
5		Mei	11.237.000	-	234.000	11.003.000	
6		Juni	11.003.000	-	-	11.003.000	
7		Juli	11.003.000	1.500.000	160.000	12.343.000	
8		Agust	12.343.000	618.000	342.000	12.619.000	
9		Sept	12.619.000	12.000	336.000	12.295.000	
10		Okt	12.295.000	-	154.000	12.141.000	
11		Nop	12.141.000	-	184.000	11.957.000	
12		Des	11.957.000	-	-	11.957.000	
	Jumlah		135.070.000	3.744.000	1.530.000	137.284.000	

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

1. Posbakum (Satker Yang Mendapat Alokasi Dan Realisasi Anggaran)

Pada Tahun 2018 terdapat 3(tiga) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas IA . Menetapkan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA : Nomor : WI8-UI/480/UM.04.1/1/2018 s/d Nomor : WI8-UI/480/UM.04.1/1/2018Tanggal 04 Januari 2018 Tentang Penyediaan Pemberian Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas IA.dengan :

1. Lembaga Konsultasi Universitas Widyagama Mahakam (WIDYAGAMA) Samarinda
2. Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan Propinsi Kalimantan Timur (LKBH PUSAKA) Samarinda .
3. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (LKBHUNTAG) Samarinda.

Pada Tahun 2019 hanya 1(satu) Lembaga yaitu Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan Propinsi Kalimantan Timur (LKBH PUSAKA) Samarinda .Surat Perintah Kerja (SPK) : PN.Samarinda No. 02/PPK.POSBAKUM/PL.08/2/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 dan LKBH PUSAKA No. 02/PPBJ.POSBAKUM/SMR/2/2019 tanggal 08 Pebruari 2019, sumber dana dari DANA DIPA No.SP.DIPA-

005.03.2.099287/2019 tanggal 5 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan 005.03.07.1049.003.001.051.AA.522131. nilai kontrak termasuk pajak sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) .Dalam kurun waktu tersebut terdapat 500 Perkara yang didampingi oleh LBH tersebut diatas, terdapat perincian sbb :

No.	MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
1.	522131	Pos BH 1(satu) LBH dari Bulan Januari s/d Desember 2019	48.000.000	48.000.000	-
JUMLAH			48.000.000	48.000.000	-

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

TIDAK ADA KEGIATAN

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

No.	MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
1.	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 2003, 244).SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia.Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya.SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktifitas yang dilakukan.Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa.Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan).Kecerdasan tolok ukurnya Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ). Dengan kata lain keberhasilan dalam setiap aspek itu sangatlah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri baik dalam hak Kualitas maupun kuantitasnya.

Akan halnya Instansi Pemerintah seperti Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA, yang merupakan salah satu Instansi Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja dan Pelayanan amatlah ditentukan dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya. Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan, demikian juga dengan kuantitas pelaksananya juga perlu dipenuhi.

Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas, yang mendukung pelaksanaan Kinerja dan Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA terdiri dari SDM Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis Yudisial, dapat kami paparkan sebagai berikut:

- **Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial, terdiri dari:**
  Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dapat kami tampilkan sebagai berikut:

Lampiran Surat Sekretaris
Nomor: 1730/SEK/OT.01.2/12/2019
Tanggal: 16 Desember 2019

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
	PENGADILAN NEGERI ,HI,TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA				
1.	KETUA	1	-	1	Aktif
2.	WAKIL KETUA	1	-	1	Aktif
3.	HAKIM KARIER	15	-	15	Aktif
4.	HAKIM ADHOC PHI HAKIM ADHOC TIPIKOR	3 2	2 1	5 3	Aktif
5.	PANITERA	1	-	1	Aktif
6.	PANMUD PERDATA PANMUD PIDANA PANMUD HUKUM PANMUD KHUSUS PHI PANMUD KHUSUS TIPIKOR	1 - - - -	- 1 1 1 1	1 1 1 1 1	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
7.	PANITERA PENGGANTI	14	-	11	1 Pensiun
8.	JURU SITA JURU SITA PENGGANTI	5 2	- 3	4 5	1 Pensiun
JUMLAH		**45**	**10**	**55**	

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, terdiri dari:**

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	Keterangan
		L	P		
1.	SEKRETARIS	1	-	1	Pensiun
2.	KA. SUB BAG PERC,IT DAN LAP KA.SUB.BAG.KEP,ORTAL KA.SUB.BAG.UM DAN KU	- 1 -	1 - 1	1 1 1	Aktif Aktif Aktif
3.	STAF	2	3	5	Aktif
JUMLAH		**4**	**5**	**9**	

- **Perbandingan Tenaga Teknis dan Non Teknis**

NO	SATKER	TENAGA		JUMLAH
		TEKNIS	NON TEKNIS	
1.	PENGADILAN NEGERI ,HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA	55	9	64

Secara lengkapnya keadaan sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA beserta Jabatannya hingga 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN			PEKERJAAN / JABATAN
			NAMA	TAHUN	IJASAH	
1.	Hongkun Otoh, SH., MH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2/UNDIP	2008	MH	Ketua
2.	Agung Sulistiyono, SH., S.Sos., MHum	Pembina Tk.I (IV/b)				Wakil Ketua
3.	Deky Velix Wagiju, SH.MH	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2/U.SEB. MAR	2006	MH	Hakim
4.	Budi Santoso, S.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	SI/UNMER	1990	SH	Hakim
5.	R. Yoes Hartyarso, S.H.MH	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2/UGM	2010	MH	Hakim
6.	Lucius Sunarno, SH., MH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2/UNS	2010	MH	Hakim
7.	Maskur, SH.	Pembina Tk.I (IV/b)	S1/U.ISL AM.JKT	1993	SH	Hakim
8.	Parmatoni, SH	Pembina Tk.I (IV/b)	SI/UISI MEDAN	1994	SH	Hakim
9.	Edy Toto Purba ,SH.MH	Pembina Tk.I (IV/b)	S2		MH	Hakim
10.	Agus Rahardjo, SH	Pembina Tk.I (IV/b)	SI			Hakim
11.	Achmad Rasyid Purba, SH.,MHum.	Pembina Tk.I (IV/b)	S2/UNMER	2011	MHum	Hakim
12.	Burhanuddin, SH,MH	Pembina Tk.I (IV/b)	S2/UII	1994	MH	Hakim
13.	Henry Dunant Manuhua, SH.MH	Pembina Tk.I (IV/b)	S2/UNMER	2011	MH	Hakim
14.	Ir. Abdul Rahman Karim, SH	Pembina Tk.I (IV/b)	SI/UNHAS	1998	SH	Hakim
15.	Joni Kondolele, S.H,MM	Pembina Tk.I (IV/b)	S2/UNCEN	1995	MM	Hakim
16.	Rustam ,SH.MH	Pembina Tk.I (IV/b)	S2/UNNIS ULA	2013	MH	Hakim
17.	Hasrawati Yunus, SH., MH.	Pembina (IV/a)				Hakim
18.	Baso Rasyid , SH.,MH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2		MH	Panitera
19.	Mudarissudin,S.Sos.	Pembina (IV/a)	SI		S.Sos	Sekretaris
20.	Isnaniah, SH.	Penata Tk. I (III /d)	SI/UNTAG	1989	SH	Panmud Hukum
21.	Lis Suriyani, SH.	Penata Tk. I (III /d)	SI/UWGM	1999	SH	Panmud Pidana
22.	Khalid, SH.	Penata Tk. I (III /d)	SI/UWGM	1998	SH	Panmud Perdata
23.	Aslina Butar-butar, SH.	Penata Tk. I (III /d)	SI/UNTAG	1996	SH	Panmud PHI/PP
24.	Syarifah Nornily	Penata Tk. I (III /d)	SMA	1983	SMA	Panmud Tipikor/PP
25.	Manaor Sihotang, SH.	Penata Tk. I (III /d)	SI	1984	SI	Ka. Sub Bag. PITP
26.	Nina Astini, S.Si	Penata Tk. I (III/d)	SI/UGM	2005	SI	Ka.Sub. Kepegawaian Ortala

27.	Tony Sunaryo, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	SI/UNMUL	2006	SE	Ka.Sub. Umum dan Keuangan
28.	Siti Mariana, SH.	Penata Tk. I (III/d)	SI/UNTAG	1989	SH	Panitera Pengganti
29.	Sri Satiti, SH	Penata Tk. I (III/d)	SH/UNIBA	1998	SH	Panitera Pengganti
30.	Yuniarti, SH.	Penata Tk. I (III/d)	SI/UWGM	2004	SH	Panitera Pengganti
31.	Mulyanto, SH.	Penata Tk. I (III/d)	SI/UWGM	2004	SH	Panitera Pengganti
32.	Riyati Sapriani	Penata (III/c)	SMEA	1980	SMEA	Panitera Pengganti
33.	Haslinda	Penata (III/c)	SMEA	1980	SMEA	Panitera Pengganti
34.	Wartini	Penata (III/c)	SMEA	1982	SMEA	Panitera Pengganti
35.	Sukri	Penata (III/c)	SMA	1983	SMA	Panitera Pengganti
36.	Rosmala Mardeanty S., SH.	Penata (III/c)	SI/UWGM	2006	SH	Panitera Pengganti
37.	Noventrix Sadly, S.Kom., SH	Penata (III/c)	SI/UWGM	2006	SH	Panitera Pengganti
38.	Mashuni Effendi, SH	Penata Muda Tk. I (III/b)	SI/TRUNAJAYA		SH	Panitera Pengganti
39.	Aris Priyo Utomo,SH.	Penata Muda Tk.I(III/b)	SI/TURNAJAYA	2008	SH	Panitera Pengganti
40.	Septi Novia Arini, SH	Penata Muda Tk. I (III/b)	SI/UWGM		SH	Panitera Pengganti
41.	Edi Purwoyuwono, SH	Penata Tk. I (III/d)	SI/UNISULA	1987	SH	Jurusita
42.	Lukman	Penata Muda Tk. I (III/b)	STM	1989	STM	Jurusita
43.	Sukadi	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMA	1987	SMA	Jurusita
44.	Kanan	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMA	1994	SMA	Jurusita
45.	Sri Mariana Login Pardosi, SE.	Penata Tk. I (III /d)	SI/USU	1996	SE	Jurusita Pengganti
46.	Ngadigdo	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMA	1981	SMA	Jurusita Pengganti
47.	Etmi Susilowati, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMA	1995	SMA	Jurusita Pengganti
48.	Amir Hasan	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMA	2002	SMA	Jurusita Pengganti
49.	Evi Wijanarko, SH	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMA	2004	SMA	Jurusita Pengganti

50.	Aprijal Kurniawan	Pengatur Tk. I (II/d)	SMA	1999	SMA	Jurusita Pengganti
51.	Herlinaningsih	Penata Tk. I (III /d)	SMEA	1982	SMEA	Staf Kepegawaian
52.	Suparman,SH	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMEA	1998	SMEA	Staf Kepegawaian
53.	Sulami	Penata Muda Tk. I (III/b)	SMA	1993	SMA	Staf PHI
54.	Ruslinda, Amd., SH	Penata Muda (III/a)	SI		SH	Staf Umum dan Keuangan
55.	Yoga Priya Wiguna, S.Kom	Penata Muda (III/a)	SI/UNPGRI	2013	Skom	Pranata Komputer Ahli
56.	Renny Ernita Fitriani, S.Psi	Penata Muda (III/a)	SI/UMM	2011	Spsi	Analis SDM Aparatur
57.	Jumransyah, S.Sos., MH	-	S2		MH	Hakim AdHoc PHI
58.	Ignatia Kasiartati, SH., MH	-	S2		MH	Hakim AdHoc PHI
59.	M. Mariyanto, SH., SE., MH	-	S2		MH	Hakim AdHoc PHI
60.	Asmiwati, SH	-	SI		SH	Hakim AdHoc PHI
61.	M. Indra Prasetyo, SH., CN	-	SI		SH	Hakim AdHoc PHI
62.	Arwin Kusmanta, SH., MM	-	S2		MM	Hakim AdHoc Tipikor
63.	Anggraeni ,SH	-	SI		SH	Hakim AdHoc Tipikor
64.	Ukar Priyambodo ,SH.MH	-	S2		MH	Hakim AdHoc Tipikor

Jumlah Personil SDM Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sebanyak 64 orang.

PESERTA CALON HAKIM :

Berdasarkan Surat dari Badan Litbag Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor : 1037/Bid.3/Dik/S/9/2018 tanggal 28 September 2018 Perihal Penyerahan dan Penugasan Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan III Gelombang III ke Tempat Pengadilan Magang sebanyak 12(dua belas) orang yaitu antara lain :

No.	Nama	NIP	Ket
1.	Muhammad Larry Izmi, S.H	198703262017121001	
2.	Rieya Aprianti, S.H.	198904052017122001	
3.	Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H	19861007 017121 001	
4.	Vega Sarlita, S.H.	199208132017122001	
5.	Dwi Army Okik Arissandi, S.H	199110232017121001	
6.	Kristin Jones Manurung, S.H	199401062018022002	
7.	Rini Ayu Lestari, S.H.	199501172017122002	
8.	Allen Jaya Akasa, S.H.	199511082017121004	
9.	Keumala Sari, S. H	199311022017122003	
10.	R. Androu Mahavira RSP, S.H	1198901220171210 03	
11.	Benny Haninta Surya, S.H.	199310052017121 007	
12.	Saifulllah Anwar, S.H.	199212212017121 003	

Dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah RI Nomor : 620/BLD/SK/VII/2018 ditetapkan tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan TUTOR Magang bagi Mentor dan Calon Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Umum di tempat Magang Yaitu HONGKUN OTOH,S.H.M.H. (Ketua Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA.

Sedangkan untuk tenaga Honorer Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA HONORER	TUGAS	KET
1.	Rendy Setiawan	Pramusaji	
2.	Junaidi Abdillah	Satpam	
3.	Subakir	Pramusaji/Perdata	
4.	Thambrin	Satpam	
5.	Agus Joko Prasetyo	Pramusaji/ Staf PHI	
6.	Nur Pansyah	Pramusaji	
7.	Heriansyah	Driver	
8.	Sarifudin	Pramusaji	
9.	Hartono	Satpam	
10.	Suwoto	Satpam	
11.	Masliansyah	Staf Tipikor	
12.	SatriaWijaya HW	Driver/Staf PHI	
13.	Irwansyah	Pramusaji	
14.	Nur Jannah	Staf Pidana	
15.	Bernand Setyawardana	Driver	
16.	Ayu Riztianika	Staf IT/Informasi	
17.	Ambo Angka	Satpam	

18.	Hasanul	Pramusaji	
19.	Mirna Ningsih	Staf Hukum	
20.	Hajrul Adderi	Staf Pidana	
21.	Darmawan	Satpam	
22.	Intan Dewi Andamaris	Staf Perdata	
23.	Deny Fernatha	Staf Tipikor	
24.	M. Helmawansyah	Staf IT Kearsipan	
25.	Della Puji Astuti	Staf Hukum	
26.	Muhammad Noor Budi	Pramusaji/Staf Tipikor	
27.	Robbiannur Saputra	Staf Pidana	
28.	Tri Nor Apriyani	Staf Keuangan	
29.	Esti Utari	Staf IT	
30.	Yuniar Rahayu	Staf Perdata	

Jumlah seluruhnya : 30 orang, yang difungsikan selain sebagai tenaga CS juga diperbantukan diruangan-ruangan sebagai pengadministrasi umum menurut bagian masing-masing.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2019 ini, kami juga memaparkan mengenai beberapa hal terkait dengan kepegawaian diantaranya:

1. REKRUITMEN

Untuk Rekruitmen Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA tidak ada kewenangan untuk Rekruitmen Pegawai.

2. MUTASI Tahun 2019

Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan karier mutasi bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IAtelah dilakukan. Mutasi yang berguna selain untuk penyegaran juga diharapkan menambah produktifitas kerja pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA.Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	
			LAMA	BARU
1.	Dwi Febry Herwanti, SH NIP. 198311152009041009	Penata (III/c)	Panitera Pengganti PN Samarinda	Panitera Muda Perdata PN Tenggarong
2.	Abd. Halim Amran, S.H., M.H NIP. 196212091988031001	Pembina Utama Madya (IV)/d)	Ketua PN Samarinda	Hakim Tinggi PN Banjarmasin
3.	Hendra Yaksa Kurniawan, SH NIP. 198402152009042008	Penata (III/c)	Panitera Pengganti PN Samarinda	Panmud Hukum PN Tenggarong

3. PROMOSI Tahun 2019

Pegawai yang mendapat Promosi Jabatan untuk tahun 2019 ini antara lain:

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	
			LAMA	BARU
1.	Yoga Priya Wiguna, S.Kom NIP. 198604292019031003	Penata Muda (III/a)	-	Pranata Komputer Ahli Pertama
2.	Renny Ernita Fitriani, S.Psi NIP. 198705302019032004	Penata Muda (III/a)	-	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
3.	Hongkun Otoh, SH.MH NIP.196707061992121001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda	Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
4.	Hasrawati Yunus, SH., MH NIP. 197412311993032001	Pembina (IV/a)	Ketua PN Majene	Hakim PN Samarinda
5.	Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum NIP. 196702181996031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Ketua PN Bantul	Wakil Ketua PN Samarinda

4. PENSIUN / PURNABHAKTI TAHUN 2019

Pegawai PN Samarinda untuk tahun 2019 ini antara lain:

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN
1.	Isnaniah, SH NIP. 195909121982032006	Penata Tk. I (III /d)	Pan. Mud. Hukum
2.	Herlinaningsih NIP. 196110011983032001	Penata TK.I(III/d)	Staf Kepegawaian

5. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	DIKLAT	LAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN
1.	-IGNATIA KASIARTATI, SH., MH -ASMIWATI, SH	- -	Hakim Ad Hoc HI Hakim Ad Hoc HI	Diklat Sertifikasi Hakim PHI	- 18 Februari s.d 06 Maret 2019 - 19 Februari s.d 06	Bandung

					Maret 2019	
2.	MASKUR, SH	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Diklat Teknis Tindak Pidana Perpajakan	22 s.d 26 April 2019	Bandung
3.	-ACHMAD RASYID PURBA, SH, Mhum -HENRY DUNANT MANUHUA, SH, MHum	Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan	01 s.d 16 Mei 2019	Bandung
4.	MASKUR, SH	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara	01 s.d 15 Juli 2019	Bandung
5.	-ACHMAD RASYID PURBA, SH, Mhum -HENRY DUNANT MANUHUA, SH, MHum	Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan	23 Juni s.d 09 Juli 2019	Bandung
6.	- Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH -RUSTAM, SH., MH	Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda	Training of Mentor III Program PPC Terpadu	25 s.d 28 Juli 2019	Bandung
7.	EDY TOTO PURBA, SH, MH	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan	12 s.d 26 Agustus 2019	Bandung
8.	ACHMAD RASYID PURBA, SH, Mhum	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Pelatihan Pemeriksaan Bukti Elektronik di Persidangan	01 s.d 07 September 2019	Bandung
9.	-EDY TOTO PURBA, SH, MH -BURHANUDDIN, SH., MH	Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum tentang Narkotika	02 s.d 06 September 2019	Bandung

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2019 secara keseluruhan rincian adalah :

1. **Belanja Pegawai**
   - **Pagu DIPA**

     Pagu Belanja Pegawai dalam DIPA 2019 setelah perubahan terakhir sebesar Rp 13.539.951.000,-
   - **Realisasi**

     Hingga akhir Desember Tahun Anggaran 2019 DIPA Belanja Pegawai telah direalisasikan sebesar Rp.11.162.058.191.000,- dengan jumlah pegawai orang dengan besarnya penyerapan anggaran untuk belanja pegawai mencapai 94,53%.
   - **Sisa**

     Dari realisasi anggaran terlihat sisa Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 646.125.809.- atau sekitar 5,47%.

2. **Belanja Barang**

   a. **Belanja Barang DIPA-01**

   Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2019 baik Belanja Barang Operasioanl sebesar Rp. 1.730.007.000,-
   - **Realisasi**

     Sampai akhir Tahun Anggaran telah direalisasikan sebesar Rp. 1.626.396.727..- atau sekitar 94,01%.
   - **Sisa**

     Dari realisasi anggaran yang ada, terlihat sisa anggaran (Pagu – Realisasi) sebesar Rp. 103.610.273,- atau sekitar 5,99%.

   b. **Belanja Non Operasional DIPA - 01**

   Pagu danBelanja Pegawai dalam DIPA 2019 setelah perubahan terakhir sebesar Rp 1.760.000,-realisasi sebesar Pr. 1.760.000,-sisa anggaran nihil,-

   Matrik realisasi anggaran belanja barang DIPA 01 kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

c. **Belanja Barang DIPA-03**

- **Pagu**

  Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 412.520.000,-

- **Realisasi**

  Sepanjang Tahun Anggaran 2019, Belanja Barang DIPA-03 telah direalisasikan sebesar Rp.406.847.176- atau sekitar 98,62%.

- **Sisa**

  Dari gambaran Pagu dan Realisasi yang ada terlihat sisa (Pagu – Realisasi) sebesar Rp.5.672.824,- atau sekitar 1,38%.

Matrik realisasi anggaran belanja barang DIPA-03 kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. **Belanja Modal**

- **Pagu**

  Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 102.000.000,-

- **Realisasi**

  Selama 1 (satu) Tahun Anggaran hingga 31 Desember 2019, Belanja Modal telah direalisasikan sebesar Rp.101.100.000,- atau sekitar 99.12%.

- **Sisa**

  Sisa anggaran terlihat dari (Pagu – Realisasi) sebesar Rp.900.000,- atau sekitar 0,88%.

Matrik realisasi anggaran belanja modal kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Data yang digunakan dalam realisasi anggaran ini masih per 31 Desember 2019, dapat kami tampilkan setelah rekonsiliasi dengan KPPN.

4. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

DIPA : 01

NO.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	KET
1.	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Januari 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
2.	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Pebruari 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
3.	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Maret 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
4.	PNBP Belanja Operasional BUA 01 April 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	

5.	PNBPBelanja Operasional BUA 01 Mei 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
6	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Juni 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
7	PNBP Belanja Operasional BUA 01 juli 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
8	PNBP Belanja Operasional BUA 01 agustus 2019	2.998.002,-	2.998.002,-		
9	PNBP Belanja Operasional BUA 01 September 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
10	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Oktober 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
11	PNBP Belanja Operasional BUA 01 nopember 2019	1.918.002,-	1.918.002,-	-	
12	PNBP BelanjaOperasional BUA 01 Desember 2019	2.338.002,-	2.338.002,-	-	
	Jumlah	22.086.024,-	22.086.024,-	-	

DIPA : 03

NO.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	KET
1.	PNBP PerkaraBadilumJanuari 2019	13.530.500,-	13.530.500,-	-	
2.	PNBP PerkaraBadilumPebruari 2019	18.836.300,-	18.836.300,-	-	
3.	PNBP PerkaraBadilumMaret 2019	20.271.700,-	20.271.700,-	-	
4.	PNBP PerkaraBadilum April 2019	14.404.000,-	14.404.000,-	-	
5.	PNBP PerkaraBadilum Mei 2019	19.853.000,-	19.853.000,-	-	
6.	PNBP PerkaraBadilumJuni 2019	14.544.500,-	14.544.000,-	-	
7.	PNBP PerkaraBadilumJuli 2019	27.591.500,-	27.591.500,-	-	
8.	PNBP PerkaraBadilumAgustus	36.764.000,-	36.764.000,-	-	

	2019				
9.	PNBP PerkaraBadilumSeptemb er 2019	18.019.500,-	18.019.500,-	-	
10.	PNBP PerkaraBadilumOktober 2019	31.273.000,-	31.273.000,-	-	
11	PNBP Perkara Badilum Nopember 2019	17.791.500,-	17.791.500,-	-	
12.	PNBP Perkara Badilum Desember 2019	21.935.000,-	21.935.000,-	-	
	Jumlah	254.814.500,-	254.814.500,-	-	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Pembangunan atau Pengadaan Sarana - Prasarana Gedung tahun anggaran 2019 : TIDAK ADA

b. Pemeliharaan Gedung

Untuk tahun anggaran 2019 ini Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung berupa perbaikan kantor dan penataan ruang sidang, Lobi serta pemeliharaan halaman kantor sebesar ± Rp.150.850.000,00.-. Pemeliharaan rumah dinas Pejabat berupa perbaikan dan pengecetan rumah Wakil Ketua sejumlah Rp. 44.250.000,-

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana-Prasarana Gedung tahun anggaran ini tidak ada.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

- Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi untuk pendukung Sarana SIPP sejumlah Rp.102.000.000,-

  Perinciansebagai berikut :

  - Laptop 4 Unit @Rp.12.500.000,- = Rp. 50.000.000,-
  - Pengadaan laptop Hakim 4 unit @Rp.13.000.000 = Rp. 52.000.000,-

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari pemeliharaan:

Lampiran Surat Sekretaris
Nomor : 1730/SEK/OT.01.2/12/2019
Tanggal : 16 Desember 2019

Matriks sarana/Prasarana di wilayah hukum

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	*Keterangan
I	**Sarana/Prasarana Gedung**		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim/Hakim Adhoc	6	Hakim Cakra(1), Hakim Sari(1), Hakim Kartika(1), Hakim Adhoc PHI(1), Hakim Adhoc Tipikor(1)
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	7	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	8	Pidana(1), Perdata(1), Hukum(1), PP(2), Tipikor(2), PHI(1)
9.	Ruang Kesekretariatan	4	Kepegawaian, IT(2), Umum & Keuangan
10.	Ruang Arsip	6	Gedung Tipikor (3), Gedung PN(3)
11.	Ruang Perpustakaan	1	
12.	Ruang Kesehatan	1	
13.	Ruang Ibu Menyusui	1	
14.	Ruang Jurusita	2	
15.	Ruang Jaksa	1	
16.	Ruang Mediasi	1	
17.	Ruang Rapat Ketua	1	
18.	Ruang Server	1	
19.	Ruang Posbakum	1	
20.	Ruang Tahanan	3	
21.	Ruang Tunggu	2	
22.	Ruang Pers	1	
23.	Ruang PH	1	
24.	Ruang Front Office	1	
25.	Ruang Ajudan Ketua	1	
26.	Masjid	1	
27.	Kantin	1	
II.	**Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran**		
1.	Komputer (PC Unit)	71	
2.	Laptop	21	
3.	Infokus	1	
4.	PABX	13	
5.	AC Split	39	
6.	Faximile	2	
7.	Genset	3	
8.	Lemari Penyimpanan	7	
9.	Bak Pemeliharaan Sementara	10	
10.	Mesin Stensil Listrik Folio	1	
11.	Lemari Besi/Metal	22	
12.	Lemari Kayu	14	

13.	Rak Besi	39	
14.	Rak Kayu	11	
15.	Filing Cabinet Besi	15	
16.	Brandkas	3	
17.	Buffet	16	
18.	Mobile File	2	
19.	CCTV	14	
20.	Papan Visual/Papan Nama	15	
21.	White Board	7	
22.	Mesin Absensi	1	
23.	Alat Pemotong Kertas	1	
24.	Papan Pengumuman	5	
25.	Meja Kerja Kayu	166	
26.	Kursi Besi Metal	238	
27.	Kursi Kayu	126	
28.	Sice	7	
29.	Bangku Panjang Besi/Metal	40	
30	Bangku Panjang Kayu	45	
31	Meja Rapat	12	
32	Meja Komputer	30	
33	Tempat Tidur Kayu	2	
34	Meja Resepsionis	3	
35	Meja Makan Kayu	2	
36	Kursi Fiber Glas/Plastik	13	
37	Mesin Pemotong Rumput	1	
38	Kipas Angin	4	
39	Radio	1	
40	Televisi	2	
41	Sound System	3	
42	Stabilisator	6	
43	Lambang Garuda Pancasila	9	
44	Tiang Bendera	15	
45	Lambang Instansi	1	
46	Asbak Tinggi	10	
47	Camera Digital	1	
48	LCD Monitor	1	
49	TV Monitor	1	
50	Screen Pembatas	2	
51	Printer	27	
52	Scanner	2	
53	External/Portebel Hardisk	1	
54	Server	3	
55	Router	2	
56	Hub	1	
57	Modem	1	
58	Rak Server	1	
59	Wireless Access Point	15	
60	Switch	6	
61	Rackmount	3	
62	Keyboard Video Monitor	1	
63	Network Cable Tester	1	

64	Peralatan Jaringan Lainnya	2	
65	Peralatan Komputer Lainnya	56	
66	Alat Tenis Meja	1	

Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	**Jenis kendaraan Roda 4**					
1.	Sedan Toyota Vios	2007	√			KT 1214 MN
2.	Minibus Toyota Kijang	1993	√			KT 135 B
3.	Minibus Toyota Kijang	2001	√			KT 1764 B
4.	Minibus Toyota Innova	2006	√			KT 1775 BZ
5.	Minibus Toyota Innova	2011	√			KT 1856 BZ
II.	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Honda 4 tak	1995			√	KT 4019 BZ
2.	Honda NF 100 SL	2006	√			KT 4150 MZ
3.	Honda NF 100 SLD	2006	√			KT 4151 MZ
4.	Honda NF 100 SLD	2006	√			KT 4152 MZ
5.	Yamaha Jupiter MX	2006	√			KT 6825 MZ
6.	Yamaha Jupiter MX	2006	√			KT 6824 MZ
7.	Honda NF 125 TR	2008	√			KT 4478 MZ
8.	Honda NF 125 TR	2008	√			KT 4477 MZ
9.	Honda NF 125 TR	2008	√			KT 4476 MZ
10.	Honda GL Pro	2011	√			KT 3134 MZ

Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	**Rumah Dinas**					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3.	Rumah DInas Hakim	6	√			
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

c. Penghapusan

Untuk Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ada proses penghapusan sudah dikirim melalui Pengadilan Tinggi Samarinda dan telah diteruskan ke Dirjend Mahkamah Agung.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- **Implementasi E-COURT di Lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA**

Foto e-court

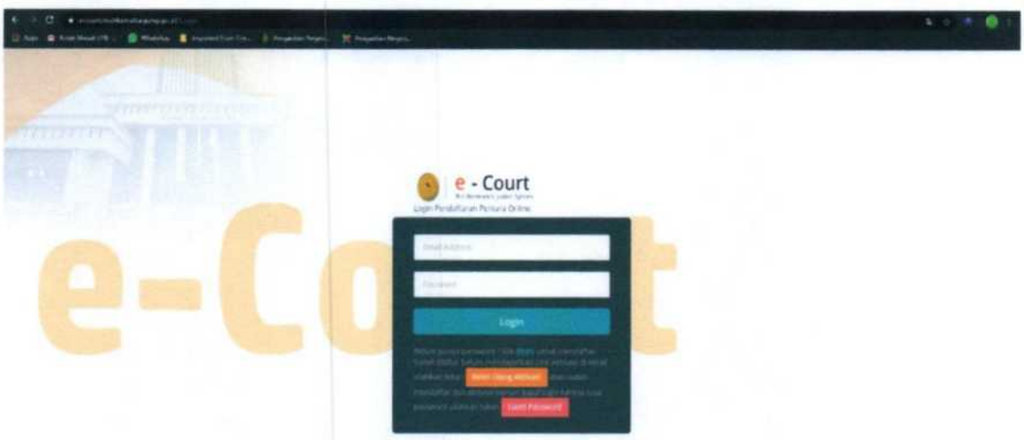

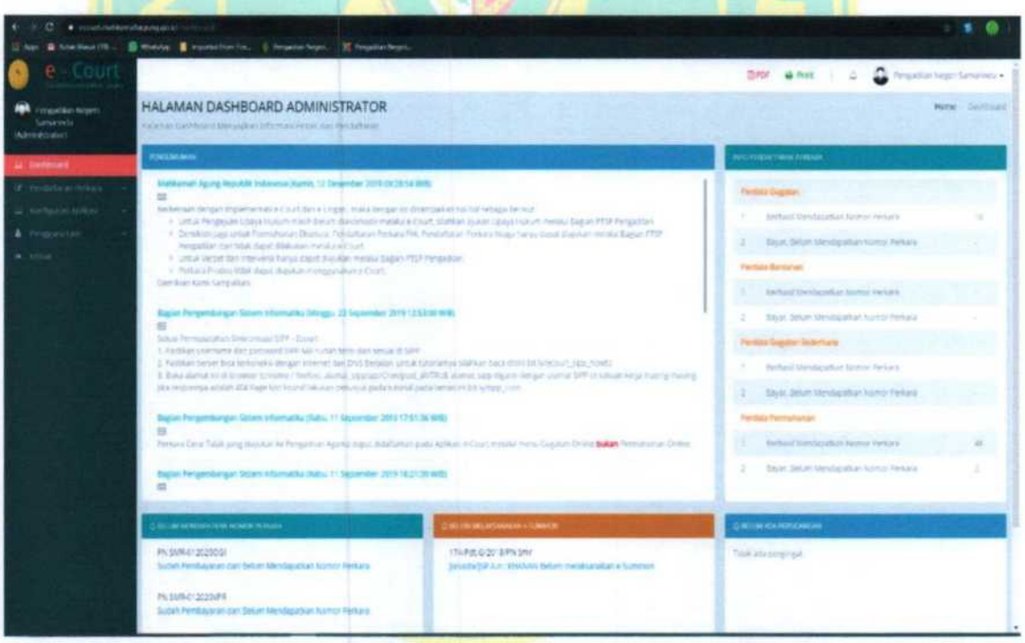

Komitmen Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan kemudahan berusaha mempermudah akses terhadap keadilan kembali dibuktikan dengan adanya aplikasi berbasis website yaitu aplikasi e-court Mahkamah Agung menjadi salah satu pelaksana administrasi di Pengadilan secara elektronik, menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 tentang Pedoman Tata kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan..

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA telah melaksanakan administrasi perkara secara eletronik dan merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan dan penyampaian dokumen perkara perdata dengan menggunakan system elektronik yang dilakukan tahap awal Desember 2018 dan pada tanggal 12 Desember 2019 bertempat di aula Kantor walikota Samarinda telah resmi dilaksanakan sosialisasi E-court , E-raterang, E-filling dan Gugatan Sederhana sampai sekarang. Dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan negeri Samarinda Kelas IA No. 20 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Administrasi Perkara secara eletronik(E-Court) pada PN Samarinda Kelas IA.

Aplikasi e-court ini merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara perdata secara on line (e-filling), pembayaran biaya perkara secara on line (e-payment) dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik(e-Summons) dan Aplikasi e-court terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dengan adanya aplikasi e-court , advokat lebih siap dalam perubahan system manajemen perkara yang tadinya manual ke system elektronik, serta dapat merespon lebih baik, transparan, cepat dan tepat waktu sesuai keinginan masyarakat pencari keadilan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistem berbasis TI.Untuk pemakaian sistem aplikasi berbasis TI, Mahkamah Agung telah membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk semua badan peradilan dibawahnya bernama SIPP/CTS untuk badan Peradilan Umum, SIADPA Plus untuk Peradilan Agama dan SIADPA-TUN untuk Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer.

- **Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA**

SIPP/CTS: adalah aplikasi berbasis website yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, yang merupakan aplikasi penelusuran perkara yang dikembangkan oleh Dirjen Badilum untuk semua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang memberikan output berupa informasi perkara. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat http://sipp.pn-samarinda.go.iddengan tampilan SIPP/CTS sebagai berikut:

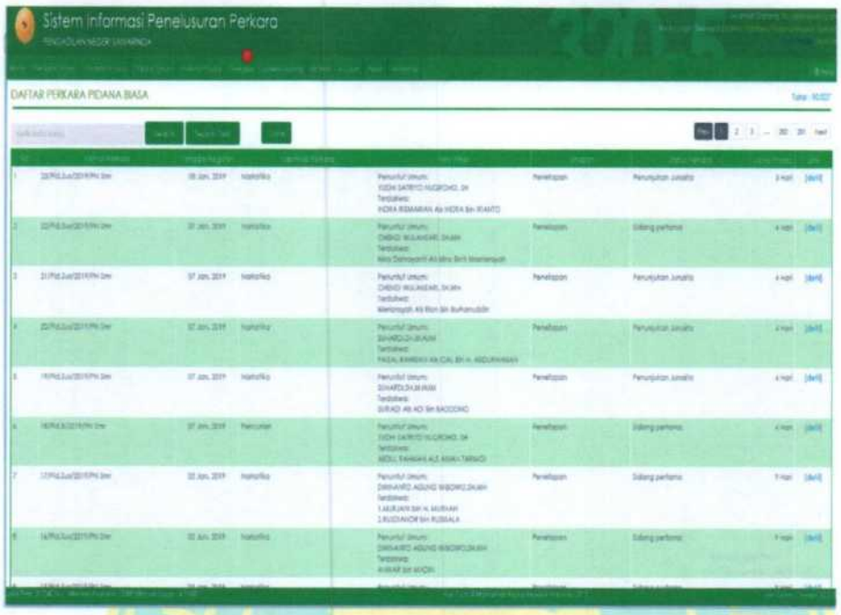

Secara garis besar kami menjabarkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak pendukung Kinerja di Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Samarinda Kelas IA adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Keras

Sampai sekarang ini jumlah atau keadaan perangkat keras Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi di Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERANGKAT IT	SPESIFIKASI	JUMLAH	KET
1.	PC Server	Processor Intel Xeon 2.33 GHz Memory 2 G HDD 160 GB LCD Monitor 15"	1 Unit	Kondisi baik
2.	PC HP	Processor Dualcore 2.4 GHz Memory 1 GB HDD 120 GB LCD Monitor 14"	4 Unit	Kondisi baik
3.	PC HP Compaq	Processor Dualcore Memory 1 GHz HDD 320 GB LCD Monitor 14"	3Unit	Kondisi baik
4.	Laptop I	Processor I5 2.4 GHz Memory 2 GB HDD 320 GB LCD Monitor 14"	2 Unit	Kondisi baik
5.	Laptop II	Processor Dualcore Memory 2 G HDD 500 GB LCD Monitor 14"	5 Unit	Kondisi baik
6.	Laptop III	Processor Core2Duo Memory 2 GH	1 Unit	Kondisi baik

		HDD 120 GB		
7.	PC 1	Processor Core2Duo Memory 1 GH HardDisk 120 GB	3 Unit	Kondisi baik
8.	PC 2	Setara Pentium IV Memory 512 GHz HardDisk 40 GB	6 Unit	Kondisi baik
9.	PC 3	Processor Intel (R) Memory 2 GHz HDD 320 GB DVD-R	3 Unit	Kondisi baik
10.	Modem Speedy		1 Buah	Kondisi baik
11.	Wireless WIFI		3 Buah	Kondisi baik
12.	Switch LAN Server	Gigabit Switch	1 Buah	Baik
13.	Switch LAN	12 port dan 8 port	2 Buah	Baik

Keseluruhan dari Perangkat Keras berupa Laptop - PC dapat kami uraikan peruangan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA RUANGAN	FASILITAS PERANGKAT IT	JML	FUNGSI
1.	Ruang KPN	PC Unit	1 Unit	Administrasi SIPP/CTS
2.	Ruang WKPN	Unit	1 Unit	Administrasi SIPP/CTS
3.	Ruang Hakim 1			Pengecekan SIPP/CTS
4.	Ruang Hakim 2			Pengecekan SIPP/CTS
5.	Ruang Hakim 3			
6.				
5.	Ruang Panitera	PC Unit	3 Unit	Administrasi SIPP/CTS
6.	Ruang Wapan	PC Unit	1 Unit	Administrasi SIPP/CTS
7.	Ruang Sekretaris	PC Unit	1 Unit	Administrasi
8.	Ruang Hukum	PC Unit Laptop	1 Unit 1 Unit	Administrasi SIPP/CTS
9.	Ruang Pidana	PC Unit Laptop	1 Unit 1 Unit	Administrasi SIPP/CTS
10.	Ruang Perdata	PC Unit	2 Buah	Administrasi
11.	Ruang Umum	PC Unit Laptop	1 Unit 1 Unit	Administrasi Aplikasi Persediaan, SIMAK, untuk Administrasi SIPP/CTS Untuk PC Service
12.	Ruang Keuangan	PC Unit Laptop	1 Unit 2 Unit	Administrasi Semua Aplikasi Keuangan (Gaji, SPM,SAKPA, dll) Aplikasi Komdanas
13.	Ruang Personalia	PC Unit Laptop	1 Unit 1 Unit	Administrasi Aplikasi SAPK Aplikasi Komdanas Aplikasi Simpeg

14.	Ruang PP	PC Unit	3 Unit	Administrasi Tugas Pokok sebagai PP SIPP/CTS
15.	Ruang IT	Laptop	1 Unit	Administrasi Pengelolaan Website

b. Perangkat Lunak

Sampai saat ini perangkat lunak untuk Pengelolaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas IA belum memadaii, kami sangat mengharapkan untuk masa mendatang untuk dukungan dana dalam hal pengadaan - pengembangan perangkat lunak untuk Pengelolaan Administrasi Perkara maupun Administrasi Umum lainnya.

Saat ini yang menggunakan program aplikasi adalah :

1. Bagian Keuangan dan Bagian Umum, yang mana perangkat lunak yang dipakai pengolahan data keuangan dan pengolahan data inventaris-umum adalah sebagai berikut:

APLIKASI UMUM	APLIKASI KEUANGAN
1. Aplikasi Persediaan 2. Aplikasi SIMAK BMN 3. Aplikasi SIMAN 4. Aplikasi SENAYAN 5. Aplikasi SIRUP 6. Aplikasi SIMANTAP	1. Aplikasi GPP 2. Aplikasi SAIBA 3. Aplikasi RKA-KL 4. Aplikasi SAS 5. Aplikasi SIMPONI 6. Aplikasi SIMARI 7. Aplikasi Master e-SPT (Pajak) 8. Aplikasi e-Rekon 9. Aplikasi e-Monev Bappenas dan e-Monev KPPN

Sementara untuk perangkat lunak untuk pengolahan data kepegawaian yang sifatnya local dan umum sudah ada tetapi belum memadai karena perlu untuk diruang sub-sub bagian ditampilkan.

Selain Aplikasi diatas, Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda juga mengoperasikan Aplikasi-aplikasi berbasis website diantaranya:

1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung RI**
2. **SAPK/BKN**
3. **KOMDANAS Mahkamah Agung RI**
4. **Sistem Informasi Kepegawaian MA-RI (Simpeg MA RI)**
5. **Monitoring Implementasi SIPP (MIS)**
6. **Aplikasi PTSP**

Aplikasi Berbasis Website

Aplikasi berbasis website yang digunakan pada Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas IA sampai saat ini selain website Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas IA sendiri adalah:

1. **Direktory Putusan** : Aplikasi berbasis website yang bangun dengan fungsi untuk mengupload data putusan semua badan peradilan termasuk putusan Mahkamah Agung yang terpusat di Mahkamah Agung yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai semua Putusan dari semua badan peradilan di Indonesia, yang setiap pengadilan telah diberi hak akses untuk mengupload putusan-putusan melalui Aplikasi ini serta memberikan output berupa informasi putusan kepada publik. Aplikasi ini dibuka untuk umum dan bisa diakses langsung melalui website http://pn-samarinda.go.id atau melalui alamat.

   Tampilan hasil aplikasi direktori putusan sebagai berikut:

2. **SAPK BKN** : aplikasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara berbasis website yang dibangun dengan tujuan untuk pengelolaan data kepegawaian setia satker baik satker lembaga atau satker kementerian menuju pengelolaan data kepegawaian berbasis IT. SAPK BKN tidak untuk publik hanya diperuntukkan buat pengelolaan data Database Kepegawaian Nasional.

   Bentuk tampilan Aplikasi SAPK BKN dengan user Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut:

3. **KOMDANAS MARI** : Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan untuk pengelolaan data Umum, Kepegawaian dan Keuangan Badan Peradilan di Indonesia. Aplikasi ini tidak bersifat pelayanan publik. Adapun bentuk tampilan:

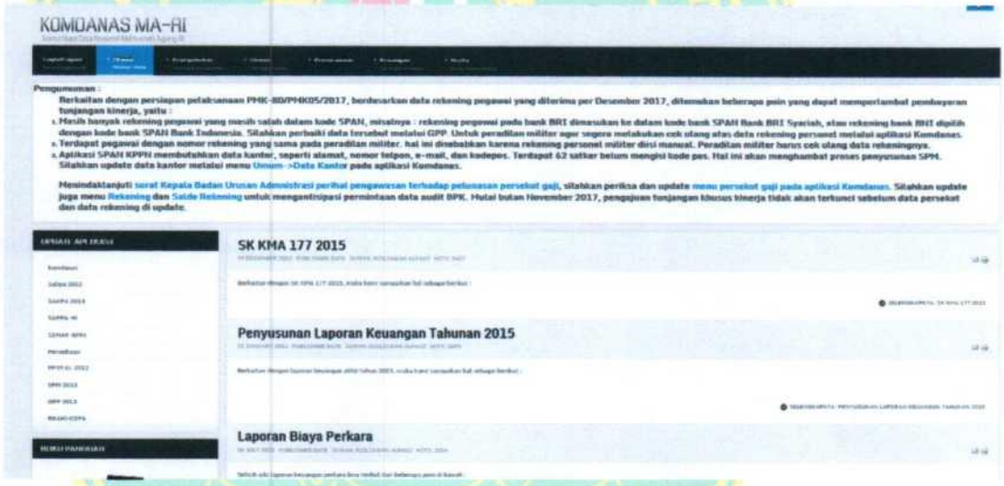

4. **SIMPEG MARI** :Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan untuk pengelolaan data Sistem Informasi Kepegawaian. Aplikasi ini tidak bersifat pelayanan intern satker. Adapun bentuk tampilan:

Itulah beberapa perangkat lunak , aplikasi yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk Tahun Anggaran 2019 ini

Sistem Informasi Kepegawaian
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sistem Informasi Kepegawaian
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Login
Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik
Version 2.0.1

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar Sertifikasi ISO09001 :2008 diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung , Pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum pada tahun 2014 maka Pengadilan Negeri Samarinda kelas IA telah memperoleh Piagam Penghargaan " ADHI DANDAPALA " atas prestasi dalam peningkatan Kinerja Pengadilan Penyerahan dilakukan di Mahkamag Agung RI Pada tanggal 18 Agustus 2014.

Piagam Penghargaan " ADHI DANDAPALA "

Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA juga menerima sebuah Sertifikat Akreditasi Penjaminan mutu Badan peradilan Umum " Terakreditasi " B "dengan nomor :TAPM.002/QMR/Sertifikat/7/2017 dari Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Bagi Pengadilan adalah suatu penilaian yang menjadi tolok ukur kinerja sebuah Pengadilan .

PIAGAM PENGHARGAAN "AKREDITASI " B "

Pengadilan Negeri , HI. Tipikor Samarinda Kelas IA dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang lebihbermutu, yaitu yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna Pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA telah memiliki system manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna Pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Hal tersebut menjadi salah satu dasar tercapainya Sistem Manajemen Mutu *STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT (ICPE) PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA.* Dan mendapat Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA sebagai Penghargaan atas kinerja dan Pelayanan yang baik dan memenuhi pelayanan standar peradilan yang bermutu. menerima Sertifikat Akreditas PMPN (Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Terakreditasi " A" (*Excellent).* Dengan Nomor : TAPM.002/QMR/Sertifikasi/06/2017

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung Khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan pelayanan prima harus terus ditingkatkan di seluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pada pencari keadilan dan pengunjung sidang dengan meningkatkan mutu pelayanan berupa pelayanan kantor penyediaan fasilitas –fasilitas untuk publik dan masih banyak lainnya.

Piagam " A" (E*xcellent*).

Piagam Penghargaan " WEB AWARDS BADAN PUBLIK 2019 "

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

- **EFISIENSI PELAYANAN ADMINISTRASI PTSP**

  PTSP

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau kelembagaan Pemerintah di Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan secara efisien dipermudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan dibawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan , dan menyederhanakan pelayanan public dengan cara menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA sebagai Lembaga Peradilan di bawahnya Mahkamah Agung **sejak tanggal 21 bulan Mei Tahun 2018** sudah mulai menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan PTSP tersebut dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA Nomor W18-UI/369/KPN/SK/I/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA, serta Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA No.W18.UI/1016/KP.02.14/III/2018 tentang Penunjukan Petugas PTSP di Lingkungan PN. Samarinda Kelas IA. Dalam hal tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan , efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas .PTSP merupakan optimalisasi penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. E-SURVEY INDIKATOR KEPUASAN MASYARAKAT

   Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan.

   Untuk memudahkan dalam pengolahan data survey indikator kepuasan masyarakat . maka kami menyediakan form survey elektronik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengisi form survey kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA.

SURVEY
KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

INOVASI NOMOR ANTRIAN PTSP

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan, dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut:

1. MAKSUD PENGAWASAN :

a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
d. Untuk menilai kinerja.

2. TUJUAN PENGAWASAN :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan public pengadilan.

3. FUNGSI PENGAWASAN :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

1. **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

PENGAWASAN MELEKAT

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA, yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah:

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA Nomor : 3 Tahun 2019, tertanggal 18 Juni 2019, tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang, hakim-hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas
1.	2	3	4
1.	Agung Sulistiyono,SH.S.Sos.M.Hum.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang
2.	Deky Velix Wagiju, SH.MH	Hakim	Umum dan Keuangan
3.	Anggreini,SH / Arwin Kusmanta,SH.MM.	Hakim	Perpustakaan
4.	Parmatoni, SH.	Hakim	Fasilitas Layanan Publik
5	Edy Toto Purba, SH.MH.	Hakim	Ortalak : Aplikasi SIKEP/Komdanas
6.	Maskur, SH / M. Mariyanto,SH.SE.MH.	Hakim	PITP : Website pn-samarinda.go.id.
7.	Hasrawati Yunus,SH.MH / Asmiwati,SH.	Hakim	Aplikasi SIPP dan Aplikasi MIS
8.	Joni Kondolele, SH	Hakim	Hukum
9.	Budi Santoso, SH	Hakim	Aplikasi Kearsipan Perkara
10.	M.Indra Prasetyo, SH. MH.	Hakim	Akses Keadilan :BH,Pembebasan biaya perkara, dan siding diluar gedung pengadilan.
11.	Ir.Abdul Rahman Karim,SH.	Hakim	Layanan Pengaduan dan Informasi : Aplikasi SIWAS
12.	LUCIUS SUNARNO,SH.MH.	Hakim	Pengawas Pidana
13.	Deky Velix Wagiju, SH. MH	Hakim	Pengawas Wasmat
14.	Agus Rahardjo, SH.	Hakim	Layanan Sidang Tilang
15.	Hendry Dunant Manuhua,SH.M.Hum.	Hakim	Pengawas Perdata : Komdanas Biaya Perkara
16.	Rustam ,SH.MH.	Hakim	Delegasi Panggilan/Pemberitahuan
17.	Hendry Dunant Manuhua,SH.M.Hum.	Hakim	Eksekusi dan Konsinyasi
18.	Burhanuddin,SH.MH./ Ukar Priyambodo,SH.MH.	Hakim	Tipikor
19.	Achmad Rasyid Purba,SH.M.Hum./Jumransyah,S.Sos.MH.	Hakim	PHI
20.	R.Yoes Hartyarso,SH.MH / Ignatia Kasiartati,SH.MH.	Hakim	Layanan Aplikasi PTSP
21.	LUCIUS SUNARNO,SH.MH.	Hakim	Panitera Pengganti
22	Ir.Abdul Rahman Karim,SH.	Hakim	Humas//Juru Bicara

Hakim- hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Samarinda , pada PengadilanNegeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA telah dilakukan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan langsung oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yaitu:

1. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi
2. Pengawasan Hakim Tinggi Pengawasan Pengadilan Tinggi

PENGAWASAN FUNGSIONAL

Sebagaimana telah disebutkan di atas, di lingkungan peradilan, Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan sebagai objek dari pengawasan fungsional, pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA telah dilakukan pengawasan oleh Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI pada 18 Mei 2018 yaitu dengan surat tugas Nomor : 499/ BP/ ST/ VII/ 2019.Pemeriksaan tersebut untuk :

1. Melakukan pemeriksaan Keuangan Perkara dan Keuangan DIPA TA 2018-2019
2. Melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan segera melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengawas MARI
3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama lima belas hari kerja meliputi :
   - Perencanaan : 01 juli dan 05 juli 2019
   - Pelaksanaan : Tanggal 08 juli sampai dengan 12 juli 2019
   - Pelaporan : Tanggal 15dan 19 Juli 2019

Sementara untuk Tahun 2019 Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA tidakmendapat Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

B. EVALUASI

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, **pengertian Evaluasi** adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA melalui Breafing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya.Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA.

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas IA dapat dikatakan terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan baik dari segi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Pendukung.
2. Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang mencapai : 95,21% dan DIPA 03 yang terdiri dari Belanja Barang mencapai : 98,62%.
3. Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri , HI, Tipikor Samarinda Kelas IA dapat dikatakan baik, dilihat dari pemenuhan kebutuhan ATK, Pemeliharaan Sarana/Fasilitas Perkantoran, Terlaksananya kegiatan perkantoran sebagaimana program utama dalam RKA yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok.

B. REKOMENDASI

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi atau Saran diantaranya :

1. Dari data Personil Sumber Daya Manusia antara Tenaga Teknis dan Nonteknis Peradilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas proposinya tidak sebanding, perlu penambahan tenaga Teknis Panitera Pengganti , Tehnis Staf dan non teknis Staf dalam mendukung tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik.
2. Penambahan Sarana Teknologi Informasi dan Fasilitas Gedung Kantor yaitu penambahan Daya Listrik(sering Anjlok), Jaringan(untuk SIPP dan PTSP) , Scanner(untuk setiap Panmud dan Kep.Sub.Bag.)dll.

Demikian laporan Tahunan ini kami sampaikan, dengan harapan dapat dijadikan bahan perbaikan menuju "*TerwujudnyaBadan Peradilan Indonesia Yang Agung*".

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. LAMPIRAN KEADAAN PERKARA PN SAMARINDA
2. LAMPIRAN REALISASI ANGGARAN 2019 PN SAMARINDA

MATRIK UPAYA HUKUM (PERKARA PIDANA, PERDATA, HI DAN TIPIKOR)
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TAHUN 2019

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS	UPAYA HUKUM			KET
			BANDING	KASASI	PK	
1.	Pidana Umum	1.132	6	4	1	
2.	Pidana Anak	48	-	-	2	
3.	Pidana Khusus Tipikor	49	17	17	-	
4.	Praperadilan	7	-	-	-	
5.	Perdata Gugatan	187	-	-	-	
5.	Perdata Khusus PHI	86	-	27	-	
6.	Perdata Permohonan	576	-	-	-	
JUMLAH		2.085	23	48	3	

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI
PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019

NO	SATKER	PAGU	REALISASI BELANJA PEGAWAI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA (01)**	Rp . 13.539.951.000,-	Rp. 12.891.314.918,-	Rp . 648.636.082,-	**Realisasi 95,21 %**

CATATAN : REALISASI BELANJA PEGAWAI PER DESEMBER 2019

REKAPITULASI BELANJA BARANG
PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019

NO	SATKER	PAGU	REALISASI BELANJA BARANG	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	**099286 (01)**	Rp . 13.539.951.000,-	Rp. 12.891.314.918,-	Rp . 648.636.082,-	**Realisasi 95,21 %**
2	**099287 (03)**	**Rp. 412.920.000**	**Rp. 406.847.176,-**	**Rp. 5.672.824,-**	**Realisasi 98,62 %**

CATATAN : REALISASI BELANJA BARANG PER BULAN DESEMBER 2019

REKAPITULASI BELANJA MODAL
PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019

NO	SATKER	PAGU	REALISASI BELANJA MODAL	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**	Rp. 102.000.000,-	Rp. 101.100.000,-	Rp. 1900.000 ,-	**Realisasi 99,12 %**

CATATAN : BELANJA MODAL KOMPLIT